

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara bisa dijadikan alat ukur untuk menganalisa tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi disuatu negara bisa disebabkan oleh banyak faktor, contohnya investasi. Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi merupakan faktor penting yang berperan besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa akan datang.

Pembentukan investasi dapat dilakukan jika masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabungkan. Tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Bagi negara-negara berkembang, investasi atau pinjaman sangat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka karena jika tingkat investasi tinggi maka produktivitas masyarakat juga akan tinggi dan akan berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat.

Menurut Sukirno (2013) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara atau daerah. Pendapatan nasional riil

tersebut dapat dihitung melalui metode pengeluaran, dua diantara jenis pengeluaran tersebut adalah pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Todaro (2000) salah satu faktor penting atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik atau sumber manusia. Todaro (2000) menjelaskan bahwa akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa untuk percepatan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaualatan politik serta ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal. Hal ini dilakukan agar dapat mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing.

Selain investasi swasta, investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari tapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian, dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan mendorong kegiatan ekonomi secara umum. Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang dianggarkan melalui APBN/APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah.

Menurut Wibisono (2005) semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah. Selain itu, menurut pendapat Keynes dalam Sukirno (2000) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan karena apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, tidak hanya perekonomian yang akan selalu tidak mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan

kegiatan ekonomi tidak akan dapat diwujudkan. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurut model makroekonomi yang dikembangkan oleh Keynes dalam Mankiw (2006), dimana terjadinya kenaikan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor akan mengakibatkan produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena pentingnya investasi swasta dan pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka perlu diteliti lebih mendalam tentang pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat sebagai daerah penelitian memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dari tahun 1996 sampai tahun 2014 adalah sebesar 4,30% per tahun. Dimana pada tahun 1998 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis yakni dari 5,14% pada tahun 1997 menjadi -6,73%. Pada tahun 2008 mencapai angka kenaikan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 6,88% dan kembali turun pada tahun 2009 yaitu sebesar 4,28%. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan investasi swasta dan pengeluaran pemerintah di Sumatera Barat yang juga mengalami fluktuasi.

Rata-rata nilai investasi Sumatera Barat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebesar 7,21% dimana angka kenaikan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 86,06% yang berbanding lurus dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Selanjutnya laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah di Sumatera Barat mempunyai rata-rata sebesar 2,17%.

Dimana penurunan laju pengeluaran pemerintah terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar -1,65% yang juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun yang sama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran investasi swasta dan juga pengeluaran pemerintah, karena investasi swasta maupun pengeluaran pemerintah dapat menjadi “*engine of growth*” bagi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sutawijaya (2010). Mengingat pentingnya perencanaan kedua variabel tersebut dalam pembangunan, maka perlu diteliti lebih mendalam mengenai pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah di Sumatera Barat. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, yang akan dibahas dengan judul **“Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pertumbuhan investasi swasta yang dicerminkan dari realisasi PMDN dan PMA, pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang dicerminkan dari realisasi belanja langsung dan tidak langsung dalam APBD serta pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 di Sumatera Barat sangat berfluktuasi. Berdasarkan data yang ada dari BPS ternyata pertumbuhan investasi swasta masih sangat lemah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, demikian juga dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa belum tentu dengan naiknya investasi swasta maka akan naik pula pertumbuhan ekonomi, begitu pula dengan

pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, peneliti merumuskan bahwa pokok-pokok perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat?
3. Bagaimana implikasi kebijakan dari kedua variabel penelitian?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dituliskan di atas, maka tujuan penulisan adalah :

1. Menganalisa pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat
2. Menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat
3. Merumuskan implikasi kebijakan dari kedua variabel penelitian guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan membuka wawasan dan pikiran bagi peneliti lebih lanjut, khususnya dalam pengembangan teori pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian dapat menambah khazanah dan pengetahuan tentang variabel yang diteliti serta wujud dari sumbangan pemikiran bagi kepentingan penulisan ilmiah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan skripsi lebih terarah maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Pada penelitian ini analisis dibatasi pada investasi swasta yang dicerminkan dari realisasi PMDN dan PMA, pengeluaran pemerintah yang dicerminkan dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD serta pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB harga konstan tahun 2000 di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data time series yaitu selama periode tahun 1996-2014. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat, sesuai dengan pengaruh yang

diberikan oleh variabel- variabel yang dibahas dalam penelitian yaitu investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini tertulis secara sistematis dan untuk mempermudah pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan dari masing-masing bab yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian ini.

BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang landasan teori dan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian tentang data dan sumber data , deskripsi variabel serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini membahas tentang kondisi geografis dan demografi Provinsi Sumatera Barat serta gambaran perekonomian melalui PDRB, perkembangan investasi, dan pengeluaran pemerintah.

BAB V TEMUAN EMPIRIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan penjabaran dari analisis data, hasil pengolahan data kemudian interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang memuat simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

